

Ada dua kosakata dalam bahasa Jawa yang begitu populer dan masuk ranah politik Tanah Air akhir-akhir ini, yakni *sontoloyo* dan *genderuwo*. Kosakata itu membuat geger panggung politik nasional dan viral di media sosial. Sebelumnya, beberapa tokoh seperti Amien Rais pernah mengucapkan kata “pemimpin sontoloyo” pada tahun 2008. Kepala BIN Syamsir Siregar juga pernah menyebut “menteri sontoloyo” pada tahun yang sama. Tapi hebohnya tidak sehebat ketika “sontoloyo” diucapkan Jokowi. Itu sekali lagi mempertegas ungkapan Bourdieu (1994) dalam *Language and Symbolic Power* bahwa makna kata bukan semata pada kamus bahasa, tetapi pada siapa yang mengucapkannya. Kata sontoloyo diucapkan bukan oleh sembarang orang, tetapi oleh seorang Joko Widodo, sang Presiden Indonesia saat ini.

Jokowi mengucapkan kata *sontoloyo* dan *genderuwo* ketika menanggapi perilaku elite politik akhir-akhir ini yang menurutnya tidak sehat dan melahirkan sistem demokrasi yang tidak mendidik. Entah mengapa Jokowi yang biasanya tidak gubris dengan berbagai serangan politik para lawannya kali ini bereaksi sehingga muncullah dua kosakata tersebut.

Sebagai manusia, mungkin Jokowi merasa pihak lawan sudah keterlaluan menyerangnya. Dia merasa apapun yang dilakukan dianggap salah. Membangun sarana prasarana publik, seperti jalan tol, jalan raya, mengunjungi korban gempa di Palu, membagi sertifikat tanah ke penduduk, menyelenggarakan pembukaan pesta olah raga se-Asia (ASIAN Games 2018) yang sangat meriah semua dianggap salah. Bahkan tidak turun hujan sehingga beberapa tempat mengalami kekeringan juga dianggap kesalahan Jokowi.

Awalnya Jokowi mengingatkan masyarakat agar berhati-hati karena banyak politisi “sontoloyo”. “Jadi gini menjelang pemilu, ini banyak cara-cara yang tidak sehat yang digunakan oleh politisi” kata Jokowi lebih lanjut usai menghadiri Trade Expo di ICE, BSD, Tangerang, Rabu 24/10/2018. Tentu saja ucapan Jokowi itu ditujukan ke lawan-lawan politiknya. Sontak berbagai tanggapan muncul, baik yang pro maupun kontra. Bagi orang Jawa, dua kosakata itu tidak asing di telinga mereka. Dari pelacakan literatur, kata “sontoloyo”, menurut M Subhan SD (Kompas 27/10/2018) dapat ditemukan dalam artikel “Islam Sontoloyo” ditulis Bung Karno di *Ma jalah Pandji Masyarakat* yang isinya otokritik Bung Karno bahwa banyak orang Islam yang cara pandanginya sempit, baru dalam tataran “kulit”, bukan “jiwa”. “Janganlah kita kira diri kita sudah mukmin tetapi hendaklah kita insyaf. Bahwa banyak di kalangan kita yang Islam-nya masih Islam sontoloyo”, tulis Bung Karno di akhir artikelnya.

Jokowi dan Fenomena Etnopolitikolinguistik (?) (antara “sontoloyo”, “genderuwo” dan “tabok”)

Written by Mudjia Rahardjo

Wednesday, 28 November 2018 00:49 - Last Updated Wednesday, 28 November 2018 01:04

Tetapi bagi orang luar Jawa, dua kosakata itu terasa asing. Masyarakat belum reda mengomentari kata sontoloyo, tiba-tiba Jokowi memproduksi kata “genderuwo”, yang diucapkan di acara bagi-bagi sertifikat di Tegal, Jawa Tengah. Jokowi mengingatkan masyarakat agar menjaga persatuan dan kesatuan dan tidak mudah terpengaruh politikus yang suka menakut-nakuti atau yang dia sebut sebagai politikus genderuwo.

Apa sebenarnya makna sontoloyo. Saya kira tidak banyak orang tahu arti kata ‘sontoloyo’. Secara harfiah, dalam Wikipedia saya temukan sontoloyo ialah sebutan bagi pemilik pekerjaan sebagai pengembala itik atau bebek atau juga disebut sebagai Tukang Angon Bebek di Pulau Jawa. Seorang sontoloyo biasanya mengembala beratus ekor bebek dengan cara berpindah mengikuti musim panen padi di daerah pesawahan untuk menggembalakan bebeknya. Definisi ini lebih mengacu pada profesi seseorang (angon bebek), sebuah profesi yang tidak memerlukan ketrampilan khusus.

Tentu saja yang dimaksudkan sontoloyo oleh Jokowi tidak sama dengan makna harfiah seperti tertulis di Wikipedia. Dalam bahasa Jawa sontoloyo lebih berupa umpatan atau makian kepada orang yang dianggap menjengkelkan. Orang yang dimaki itu dianggap ngawur, bodoh, asal njeplak, konyol dan sebagainya. Pokoknya makna sontoloyo itu terkait dengan hal-hal buruk.

Belum reda pembahasan tentang sontoloyo di kalangan masyarakat, Jokowi memproduksi kata genderuwo. Walau saya paham makna genderuwo, tetapi saya ingin memperoleh makna yang lebih pasti. Sejak kecil saya akrab dengan istilah genderuwo. Misalnya, di desa kelahiran saya ada pohon beringin besar di tengah-tengah sawah yang biasa digunakan tempat berteduh. Orang mengatakan di bawah pohon itu banyak genderuwonya, artinya banyak hantunya, sehingga tidak banyak orang berani ke tempat itu sendirian, di siang hari sekalian. Tempat itu terkesan angker. Sayangnya pohon itu kini telah tidak ada lagi. Saya juga tidak tahu bagaimana nasib genderuwonya. Masih di tempat itu, atau pergi entah ke mana.

Di Wikipedia, saya temukan genderuwo sebagai mitos Jawa sejenis bangsa jin atau makhluk halus berwujud manusia mirip kera yang bertubuh besar dan kekar dengan warna kulit hitam kemerahan, tubuhnya ditutupi rambut lebat yang tumbuh di sekujur tubuh. Nah, menyeramkan sekali ya sosok genderuwo itu!. Seperti sontoloyo, kata genderuwo yang dimaksudkan Jokowi tentu tidak sama dengan makna menurut definisi Wikipedia.

Tentu tidak sulit bagi kita memahami untuk apa kata genderuwo diucapkan dan kepada siapa itu ditujukan. Mitologi Jawa mengartikan genderuwo merupakan sosok menyeramkan atau

menakutkan yang dikaitkan dengan tempat-tempat wingit, gedung-gedung tua, rumah-rumah kosong dan lain sebagainya. Orangtua Jawa biasanya menggunakan istilah genderuwo untuk menakut-nakuti anak agar tidak main di tempat-tempat seperti disebut, atau tidak keluar di waktu malam sendirian. “Awas ada genderuwo lho”, begitu peringatan para orangtua Jawa kepada anak-anak mereka.

Dalam kontestasi politik menjelang pilpres 2019 saling menyerang lawan secara verbal adalah hal biasa. Dua kosakata sontoloyo dan genderuwo oleh Jokowi tentu ditujukan ke lawan-lawan politiknya yang terus menyerang dirinya. Jika sontoloyo ditujukan ke lawan-lawan politik yang dianggap asal jeplak bicara (tanpa data), konyol, tolol dan sebagainya, maka kata genderuwo ditujukan ke lawan-lawan politik yang suka menakut-nakuti rakyat dengan melontarkan isu-isu negatif yang menyeramkan.

Dalam perspektif sosiolinguistik, setiap era kepemimpinan diyakini menghadirkan wacana kebahasaan yang berbeda dengan era kepemimpinan lainnya. Jokowi yang lahir dari keluarga Jawa, tumbuh dan hidup dalam kultur Jawa yang kental (Solo) mengenalkan istilah dalam bahasa Jawa yang hanya bisa dipahami secara utuh oleh orang Jawa. Istilah sontoloyo dan genderuwo dibawa dalam arena politik sebagai piranti meng-*counter* lawan politik menjelang pilpres. Jokowi menggunakan dua kosakata khas itu bisa jadi karena sudah tidak bisa menemukan kosakata dalam bahasa Indonesia yang tepat untuk menggambarkan sosok lawan politiknya yang tidak henti-hentinya menyerang.

Di kesempatan yang lain baru-baru ini, Jokowi melontarkan kata “tabok” kepada orang-orang yang selama ini menuduhnya sebagai anggota PKI, alias Partai Komunis Indonesia. “Tabok” juga kosakata khas Jawa. Berkali-kali Presiden Jokowi menjelaskan di berbagai kesempatan bahwa dia dan keluarganya bersih dari unsur PKI, bahkan ketika PKI memberontak tahun 1965 usianya baru 4 tahun. Namun demikian hingga saat ini tuduhan itu masih tetap saja terjadi. Apa artinya “tabok”? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “tabok” berarti memukul (kepala dan sebagainya) dengan telapak tangan, menampar.

Sebenarnya jika dibanding dengan kata “sontoloyo” dan “genderuwo”, makna kata “tabok” lebih keras. Dua kosakata sebelumnya ada unsur humornya, sedang kata tabok mengandung aspek kekerasan fisik. Mungkin Jokowi sangat geram ketika dituduh sebagai anggota PKI. Sebab, PKI adalah partai terlarang di Indonesia. Bisa dibayangkan jika seseorang benar-benar terbukti menjadi anggota PKI, apalagi seorang pemimpin, maka habis sudah seluruh perjalanan kariernya. Sebab Partai Komunis dianggap melawan Pancasila, sehingga pantas dimusnahkan. Oleh Joko Santoso (Kompas, 2/9/2017) praktik demikian disebut sebagai bahasa tuduh. Karena itu, kemarahan Jokowi sangat bisa dimaklumi. Ucapan itu menggambarkan bahwa kemarahan

Jokowi sudah sampai puncak.

Di masa-masa akhir kekuasaannya yang mulai rapuh dan digoyang oleh berbagai kekuatan oposisi, Pak Harto pernah melontarkan kata “gebuk” untuk lawan-lawan politiknya. Tak pelak lontaran Pak Harto juga menghebohkan dunia perpolitikan tidak saja di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Sebab, Pak Harto biasanya kalem dalam berbahasa dan jarang melontarkan kata-kata keras dan kasar. Pak Harto sepertinya sudah tidak kuasa menahan emosi ketika pemerintahannya mulai digoyang dan aksi-aksi dari yang tidak puas sudah mulai muncul di mana-mana.

Rupanya setiap pemimpin memproduksi kosakata khas sesuai keadaan masyarakat dan latar sosial-kultural sang pemimpin. Kita mungkin masih ingat ketika Gus Dur menjadi presiden (20 Oktober 1999-23 Juli 2001) dan Amien Rais sebagai Ketua MPR, yang sama-sama berasal dari organisasi keagamaan (Islam) besar, istilah-istilah khusus bermuatan agama juga muncul begitu deras, seperti *istighosah*, *jihad*, *bughat*, *islah*, *bahtsul masail*, *tausyiah* dan lain-lain. Istilah-istilah itu tidak lepas dari latar sosial dan kultural Gus Dur yang lahir dan tumbuh dalam lingkungan pondok pesantren, dan sehari-hari berprofesi sebagai kyai. Anggota masyarakat yang tidak akrab dengan kultur pesantren bisa jadi bingung memahami istilah-istilah itu. Oleh Artha (2002: 42) Gus Dur disebut menumbuhkan iklim religiopolitik, yang dapat ditafsirkan sebagai bangkitnya pengabsahan penggunaan simbol agama dan dalih agama untuk kepentingan politik. Karena wacana itu muncul dalam wujud verbal, lebih tepatnya Gus Dur disebut membangun iklim “religiopolitikolinguistik”, yakni fenomena bahasa bermuatan nilai-nilai agama yang digunakan dalam arena pertarungan politik, sehingga di dalamnya ada tiga komponen, yaitu agama, politik, dan bahasa hadir bersamaan dalam wadah wacana politik.

Sepertinya tidak mau kalah dengan Gus Dur, dalam himbauannya kepada para elite politik dan penyelenggara negara agar dapat menciptakan iklim politik yang sejuk, PB NU sebagai wadah organisasi massa terbesar di Indonesia juga tidak kalah aktifnya memproduksi istilah-istilah khas pondok pesantren, seperti *taushiyah* (nasihat), *tawasuth* (jalan tengah), *tawazun* (seimbang), dan *tasamuh* (toleran) (Kompas, 31/3/2001).

Jika Gus Dur yang berlatar belakang pondok pesantren dengan tradisi keislaman yang kental menumbuhkan fenomena “religiopolitikolinguistik”, maka Jokowi yang berlatar sosial dan kultural Jawa yang kental (Solo) tanpa disadari mengembangkan apa yang disebut sebagai “etnopolitikolinguistik”, yakni fenomena bahasa khas oleh etnik tertentu yang digunakan dalam arena politik.

Munculnya fenomena demikian menggambarkan masyarakat memiliki ruang ekspresi yang sangat longgar di tengah demokratisasi di Indonesia yang terus berlangsung. Di satu sisi kita merasa prihatin jika pertarungan para elite politik dapat memperkeruh suasana kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi di sisi yang lain kita dapat menyaksikan munculnya fenomena kebahasaan yang menarik. Sebab, bahasa hadir tidak saja sebagai alat komunikasi sebagai fungsi hakikinya, tetapi juga menjadi piranti perjuangan para elite politik.

Informasi, gagasan, pendapat, sikap politik, imajinasi dan pilihan kebijakan semuanya disampaikan dalam bahasa dan melalui bahasa. Secara akademik, fenomena demikian dapat mengembangkan kajian linguistik diakronik secara lebih leluasa. Selain media massa, figur publik adalah produsen bahasa yang efektif. Gaya bahasa elite biasanya ditiru pengikutnya, dan setidaknya bisa menjadi medan diskusi dari berbagai sudut pandang.

Pertanyaannya ialah efektifkah penggunaan istilah-istilah seperti itu untuk membangun kekuatan dalam kontestasi politik? Untuk menjawabnya para ahli bahasa dan ilmu politik bisa melakukan penelitian secara bersamaan. Kajian bahasa secara diakronik bisa mempertemukan disiplin ilmu linguistik dengan disiplin lainnya tidak saja secara teoretik dalam ranah, tetapi secara praktik di lapangan. Seiring dengan kemajuan dan dinamika masyarakat yang semakin kompleks, bertemunya dua atau lebih disiplin ilmu yang berbeda untuk melihat satu persoalan yang sama sudah bukan hal baru. Fenomena etnopolitikolinguistik adalah sebuah tawaran untuk direnungkan para ahli dan peminat studi bahasa diakronik.

Malang, 26 November 2018

Sumber Bacaan:

Artha, Arwan Tuti. 2002. *Bahasa dalam Wacana Demokrasi dan Pers*. Yogyakarta: AK Group.

Jokowi dan Fenomena Etnopolitikolinguistik (?) (antara “sontoloyo”, “genderuwo” dan “tabok”)

Written by Mudjia Rahardjo

Wednesday, 28 November 2018 00:49 - Last Updated Wednesday, 28 November 2018 01:04

Kompas, 31 Maret 2001.